

BAB III

KEBIJAKAN LUAR NEGERI MALAYSIA TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN KIM JONG NAM

Dari awal berdiri hingga akhir tahun 2016 lalu hubungan diplomatik antara Malaysia dan Korea Utara memang tidak selalu damai. Namun kali ini Malaysia mengimplementasikan kebijakan luar negeri yang bersifat hard power untuk melindungi kepentingan nasional negaranya. Dalam pengimplementasian kebijakan luar negeri Malaysia kali ini di pengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti pandangan dari negara lain terhadap Malaysia yang merupakan negara yang menganut sistem demokrasi parlemen dan sangat mengedepankan kepentingan bersama, dengan tidak mengambil tindakan yang biasa untuk mengatasi permasalahan yang cukup rumit membuat Malaysia di pandang kurang bijak untuk menghadapi permasalahan didalam negaranya dimata internasional. Keputusan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, lalu dipilah oleh pembuat keputusan berdasarkan kepentingan yang signifikan bagi dalam negaranya.

3.1. Awal Permasalahan

Pada 13 Februari 2017 lalu, terjadi kasus pembunuhan di Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA), yaitu pembunuhan kakak dari pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, Kim Jong Nam oleh 2 orang TKI yang diduga sebagai suruhan, yang keduanya berkewarganegaraan Vietnam dan Indonesia, karena alasan ini banyak kontroversi yang terjadi antara Korea Utara dan Malaysia. (Zulkodri, 2017). Kedua warga negar asing tersebut membunuh Kim Jong Nam dengan menggunakan racun VX¹ yang mematikan, namun kedua orang TKI tersebut setelah

¹ Merupakan racun dengan senyawa golongan organofosfat yang tidak berbau dan tidak berwarna yang mampu mengganggu system saraf tubuh dan digunakan sebagai racun saraf dalam perang kimia. 10 mg cukup untuk membunuh manusia melalui kontak pada kulit, dan merupakan senjata pemusnah masal.

di selidiki tidak tahu jika itu adalah racun, dan mereka mengaku bahwa mereka disuruh melakukan hal tersebut yang dikira merupakan acara prank di TV, oleh karena itu mereka tidak tahu bahwa itu adalah sebuah racun. (Kristanti, 2017).

Tiba-tiba, seorang perempuan muda berambut pendek mendekatinya dari belakang. Perempuan yang belakangan teridentifikasi sebagai warga Vietnam, Doan Thi Huong itu tampak mengenakan baju putih bertuliskan LOL dipadu rok pendek dan celana ketat berwarna pink. Menurut beberapa sumber orang tersebut merupakan pengalih perhatian. Sementara pembunuh sebenarnya yang diduga agen bayaran Korut adalah seorang pria. Pelaku menyamar jadi perempuan dan dengan cepat membekap korban dengan sapu tangan atau kain yang sudah dicampur racun (risin). Risin adalah senyawa kimia beracun yang lebih mematikan daripada sianida. Racun ini bisa menimbulkan kelumpuhan otot, kesulitan bernapas, sesak napas dan kematian. Mirip dengan risin, ada racun tetradotoksin yang terkandung dalam hati ikan buntal. Dampaknya bisa 1.200 kali lebih mematikan daripada racun sianida. Pembekapan dengan kain sendiri masih teori, karena polisi belum menemukan bukti kuatnya. Di sisi lain, CCTV bandara merekam ketika Huong menyemprotkan cairan ke muka korban. Kaget dengan aksi perempuan tak dikenal itu, Jong-nam segera lari ke kamar mandi. Kemungkinan untuk mencuci wajahnya. Tak lama, dia keluar dan sambil mengerjap-ngerjapkan mata berjalan ke arah meja informasi, meminta bantuan. Kim Jong Nam dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun meninggal sebelum sampai. Dilaporkan, tekanan darah Kim Jong Nam meninggi ketika dia meninggal. Guna memastikan penyebab kematiannya, otoritas Malaysia memerintahkan otopsi. Selain itu, air seni dan darahnya diambil sebagai sampel. Lalu dibawa ke laboratorium untuk dianalisa. Penelitian ini bisa memakan waktu sepekan. (Dharma, 2017).

Pembunuhan yang terjadi di Kuala Lumpur International Airport (KLIA) membuat Malaysia merasa harus menyelesaikan permasalahan tersebut sebagai negara dimana

tempat kejadian pembunuhan terjadi. Diduga ada 4 orang warga Korea Utara yang terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Kepolisian Malaysia gagal menangkap empat tersangka warga negara Korea Utara tersebut yang diduga menjadi dalang dari pembunuhan. Bahkan satu tersangka bersembunyi di kedutaan besar Korea Utara, Kuala Lumpur, di hari yang sama setelah pembunuhan terjadi, sementara tiga lainnya berhasil melarikan diri ke luar negeri, di hari yang sama setelah terjadi pembunuhan. (Permadi, 2017). Polisi Malaysia menyangka dalang dibalik kasus ini adalah ulah dari agen intelejen Korea Utara.

3.2. Kebijakan yang diambil Malaysia

Penyelidikan terkait kasus ini akan dilakukan oleh Malaysia, tanpa melibatkan negara lain yang berkepentingan, yaitu Indonesia, Vietnam, dan Korea Utara. Keputusan Malaysia untuk tidak melibatkan Korea Utara dapat dimaklumi mempertimbangkan kondisi-kondisi yang terjadi sebelumnya, yaitu ketika Korea Utara dianggap tidak dapat bekerjasama dengan otoritas Malaysia dalam penanganan kasus ini. Berdasarkan hukum internasional, Malaysia memang dapat dikatakan sebagai negara yang paling berhak atas pelaksanaan penyelidikan dan pemberlakuan hukum atas suatu kasus yang terjadi di wilayah kedaulatannya. Doktrin tersebut dinamakan penegakan yurisdiksi berdasarkan prinsip teritorial. Prinsip ini ialah prinsip yang diakui secara luas oleh negara-negara di dunia. Menurut Bantekas (2001:144), negara yang berhak atas prinsip ini mendapatkan prioritas utama dalam penanganan dan pemberlakuan hukum atas suatu kasus. Namun hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa prinsip ini tidak berdiri sendiri dalam konsep besar penegakan yurisdiksi atas suatu persoalan hukum. Setelah prinsip ini ada prinsip nasionalitas/personalitas, yang terdiri dari prinsip personalitas aktif dan pasif. (Muhammad, 2017).

Penegakan prinsip yurisdiksi berdasarkan prinsip nasionalitas merupakan prinsip yang mengakui adanya tambahan kuasa penegakan hukum suatu negara pada sebuah peristiwa hukum yang tidak terjadi di wilayahnya demi

menjamin perlindungan terhadap warga negara. Mueller (1965:61) mengatakan bahwa prinsip nasionalitas merupakan terobosan pemenuhan kewajiban negara untuk senantiasa melindungi warga negaranya di mana pun mereka berada. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, prinsip ini terdiri dari prinsip personalitas aktif dan pasif. Prinsip personalitas aktif berlaku kala individu dari suatu negara melakukan pelanggaran hukum di negara lain dalam kasus ini ialah TKI asal Indonesia dan warga negara Vietnam, diduga telah melakukan pelanggaran hukum di Malaysia. Adapun prinsip personalitas pasif berlaku kala individu dari suatu negara menjadi korban atas suatu pelanggaran hukum yang terjadi di negara lain dalam kasus ini yaitu Kim Jong Nam, yang merupakan warga negara Korea Utara, yang terbunuh di Bandara Internasional Malaysia. (Muhammad, 2017).

Prinsip nasionalitas ini secara serta merta menegaskan posisi Malaysia sebagai pemegang hak tunggal penegakan yurisdiksi dan pelaksanaan penyelidikan kasus kematian Kim Jong Nam. Dengan tidak melibatkan negara berkepentingan dalam proses pelaksanaan penyelidikan suatu kasus yang kebenaran atas berbagai tesisnya masih perlu dipertanyakan (karena masih banyak *suspect* yang belum dapat dimintai keterangan), Malaysia bisa dikatakan menerapkan penegakan yurisdiksi berdasar prinsip teritorial yang terlalu ketat di negaranya. Meski tidak dilarang secara eksplisit dalam hukum internasional, hal tersebut berpotensi mengurangi hak negara lain untuk ikut dalam proses penegakan hukum atas suatu peristiwa yang merugikan kepentingan negaranya. Dalam kasus ini, Indonesia dan Vietnam memiliki hak untuk melindungi kepentingan negaranya yang akhirnya terkena dampak. Diplomat dari kedua negara tersebut sempat mengalami kesulitan untuk bertemu warga negaranya yang sedang terseret suatu permasalahan hukum di Malaysia. Jadi, adanya justifikasi dari kebijakan Malaysia yang tidak melibatkan Korea Utara dalam penanganan kasus ini. Hal tersebut adalah berbagai pernyataan otoritas Korea Utara yang dianggap mengganggu penanganan kasus ini. Pada dasarnya bisa dipahami justifikasi

Malaysia memberlakukan kebijakan yang ketat atas campur tangan negara lain tentang penanganan kasus yang terjadi di negaranya ialah karena hal tersebut berpotensi mencoreng marwah kedaulatan dan penegakan yurisdiksi di wilayah Malaysia. (Muhammad, 2017).

Pemerintah Malaysia melakukan otopsi terhadap jenazah Kim Jong Nam dan mencoba mencocokkan dengan gen Kim Jong Un agar dapat dipastikan bahwa yang meninggal benar-benar kakak dari Kim Jong Un, (Sumarwah, 2017), tersangka pembunuhan diduga satu orang warga negara Malaysia dan delapan warga negara Korea Utara, yang salah satunya diduga diplomat di Kedutaan Besar Korea Utara untuk Malaysia. Otoritas Malaysia, dengan petunjuk dari Korea Selatan, mencurigai adanya peran dari otoritas Korea Utara dalam peristiwa kematian Kim Jong Nam. Oleh karena itu, penting untuk mendapatkan keterangan dari pejabat diplomatik Korea Utara yang bertugas di Malaysia. Namun Korea Utara tidak dapat bekerjasama dengan otoritas Malaysia dalam penanganan kasus ini, karena tidak mengizinkan salah satu diplomatnya untuk diinterogasi. Dalam hal ini, Korea Utara menggunakan hak imunitas yang dimiliki diplomat yang sedang bertugas di negara lain, berdasarkan aturan yang ada pada Vienna Convention on Diplomatic Relations. (Muhammad, 2017).

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons atau Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) yang bermarkas di Hague sempat menerima pernyataan tertulis dari wakil tetap Malaysia terkait dengan penggunaan bahan kimia racun saraf VX dalam kasus pembunuhan Kim Jong-nam. Wakil tetap Malaysia, Datuk Ahmad Nazri Yusof menjelaskan kepada Anggota Dewan Eksekutif OPCW tentang penggunaan racun saraf VX dalam kasus pembunuhan Kim Jong Nam di Bandara Internasional Kuala Lumpur 2 (KLIA 2) pada 13 Februari lalu. Ahmad Nazri juga menjelaskan Malaysia mengutuk penggunaan bahan kimia oleh siapa pun dan dalam keadaan apa pun selain menegaskan penyelidikan yang menyebabkan penemuan bahan kimia berbahaya yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan hukum Malaysia. (Ibrahim, 2017).

Kedutaan Korea Utara di Malaysia telah diberitahu tentang prosedur dan kemajuan penyelidikan sejak hari pertama insiden itu. Konvensi Senjata Kimia Malaysia juga telah berhubungan dengan OPCW untuk meminta bantuan teknis untuk membantu penyelidikan kematian Kim Jong Nam. Malaysia juga memberi kerjasama penuh kepada OPCW dan selalu mematuhi hukum berdasarkan Pasal 1 Konvensi Larangan Penghasilan, Penyimpanan dan Penggunaan Senjata Kimia Untuk Tujuan Kemusnahan (CWC). Malaysia tidak menghasilkan, menyimpan stok, mengimpor, mengekspor atau menggunakan bahan kimia beracun termasuk VX yang tercantum dalam Jadwal pertama CWC. (Ibrahim, 2017).

Dan Malaysiapun mendapatkan bantuan dari Organisasi Senjata Kimia (OPCW) untuk menyelidiki zat kimia VX yang digunakan dalam kasus pembunuhan Kim Jong-nam. Kementerian Luar Negeri membuat pernyataan bahwa OPCW telah menyediakan fasilitas teknis seperti yang diminta oleh Malaysia untuk membantu dalam menyelidiki kasus tersebut. Karena Malaysia memberikan kerja sama penuh kepada OPCW dan selalu mematuhi undang-undang berdasarkan Pasal 1 dari Konvensi tentang Larangan Penghancuran, Penyimpanan dan Penggunaan Senjata Kimia untuk Tujuan Penghentian (CWC).

Oleh karena itu, kementerian sangat membenci penggunaan senjata kimia oleh siapa saja dalam hal apapun yang lebih umum digunakan di tempat-tempat umum yang dapat membahayakan kehidupan orang-orang. Dalam hal ini, OPCW juga telah menyatakan komitmennya untuk membantu menyelidiki kasus yang diperlukan. Pemerintah Malaysia siap untuk memberikan kerja sama penuh kepada OPCW atau organisasi internasional untuk membawa pelaku ke pengadilan. (Ibrahim, 2017).

Kepolisian Malaysia juga menyegel dan menutup gedung Kedutaan Besar Korea Utara di Kuala Lumpur untuk mencegah sejumlah pejabat di kantor tersebut ke luar negeri, karena ingin mengidentifikasi secara fisik semua staf kedutaan yang berada di kedutaan. Semua staf kedutaan Korea Utara tidak boleh keluar dari gedung sampai diketahui jumlah dan keberadaan mereka. Sebelumnya pada hari yang sama, Pyongyang melarang semua warga Malaysia yang berada di Korea Utara untuk meninggalkan negara tersebut. Kebijakan itu kemudian dibalas oleh Malaysia dengan penyegelan kantor kedutaan. (Sukarno, 2018)

Dalam konferensi pers di Kuala Lumpur, kepala kepolisian Malaysia mengatakan bahwa tiga orang buron asal Korea Utara kini tengah bersembunyi di kedutaan negara tersebut. "Mau berapa lama mereka bersembunyi di dalam kedutaan? Ini hanya masalah waktu sebelum mereka keluar," kata kepala kepolisian Khalid Abu Bakar. "Kami tidak akan menggeledah gedung kedutaan, kami hanya akan menunggu mereka keluar," katanya. Sebelumnya, sejumlah pejabat Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan menduga bahwa agen rahasia dari Pyongyang merupakan dalang dibalik pembunuhan terhadap Kim Jong Nam yang selama ini tinggal di pengasingan di Makau dengan perlindungan Cina. (Sukarno, 2018).

Akibat dari konflik diplomatik ini juga akhirnya. Pemerintah Malaysia memulangkan lebih dari 140 warga Korea Utara usai konflik diplomatik antara kedua negara beberapa bulan belakangan ini. Wakil Menteri Dalam Negeri Masir Kujat menyebutkan imigran Korea Utara dikumpulkan di wilayah

Sarawak oleh Departemen Imigrasi bulan lalu. Menurut siaran pers Menteri Luar Negeri Datuk Seri Anifah Aman terkait kematian seorang warga Korea Utara di Malaysia. (Putrajaya, 2017).

1. Pada 20 Februari 2017, Duta Besar Republik Demokratik Rakyat Korea ke Malaysia telah mengedarkan siaran pers. Pernyataan pers berisi beberapa tuduhan terhadap kematian seorang warga negara yang berlangsung pada 13 Februari 2017. (Putrajaya, 2017).

2. Tuduhan yang bersandarkan kebohongan dan hal yang tidak sepenuhnya benar, telah menjadi kesimpulan duta besar Korea Utara dan penyelidikan itu didalangi pihak yang berada di balik layar dan investigasi yang dikelola bukan bertujuan untuk mengetahui penyebab kematian dan untuk menemukan tersangka, tetapi bermotif politik. (Putrajaya, 2017).

3. Ketika duta besar Malaysia dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri, Wakil Sekretaris Jenderal Hubungan Bilateral menekankan bahwa penyelidikan dilakukan untuk mendukung siapa pun. Ini juga dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan Malaysia. (Putrajaya, 2017).

4. Ada perbedaan yang dibuat dalam menyangkal fakta ini, atau bahkan mengatakan bahwa Malaysia berkonspirasi dengan negara asing, hal ini adalah sebuah penghinaan besar terhadap Malaysia. (Putrajaya, 2017).

5. Investigasi polisi didasarkan pada semua instruksi yang tersedia. Instruksi-instruksi ini akan diselidiki sepenuhnya. Indikator-indikator ini mungkin terlompati dalam beberapa kasus, tidak ada hubungan dengan informasi yang diberikan oleh kedutaan atau entitas lain. (Putrajaya, 2017).

6. Di mana-mana tatacara, itu adalah praktik bahwa kasus-kasus seperti itu akan diselidiki secara komprehensif. Hal tersebut adalah tanggung jawab pemerintah untuk melakukannya. Masyarakat juga akan menuntut hal yang sama, dengan demikian, informasi kepada publik telah diberikan seperlunya. (Putrajaya, 2017).

7. hal ini adalah hal yang ajar bagi pihak kedutaan untuk bekerjasama sepenuhnya dengan pemerintah negara lain untuk memastikan investigasi yang dilakukan serapi mungkin dan bukan untuk menimbulkan kecurigaan terhadap penyelidikan itu. (Putrajaya, 2017).

Koran di Malaysia terkait Pembunuhan Kim Jong Nam mengatakan Diplomat yang mendapatkan kekebalan ini hanya duta besar, sekretaris pertama, kedua, ketiga, konsuler, dan menteri konsuler. Kwang Song disebut berada di posisi sekretaris kedua. Untuk itu pemerintah Malaysia meminta Korut mencabut kekebalan hukum Kwang Song demi lancarnya proses penyelidikan kematian Kim Jong Nam. Namun diplomat senior kepada media Malaysia, Korea Utara tidak akan mungkin melakukan hal itu. Dia menjabarkan beberapa skenario yang mungkin diambil Malaysia. Pertama, menetapkan Kang Chol sebagai **persona non-grata**² dan diusir dari Malaysia. Namun hal ini tidak akan membantu didalam proses penyelidikan. (Sukarno, 2018).

Keberadaan tiga orang tersangka yang melarikan diri dari Malaysia pada hari terjadinya pembunuhan belum jelas, walau pihak Interpol sudah mengeluarkan "*red note*"³ yang membuat kepolisian di luar negeri bisa menangkap mereka. (Yasinta, 2017). Selain itu Malaysia melakukan **persona non-grata**⁴ terhadap diplomat Korea Utara, Kim Chul, serta menarik Diplomat Malaysia di Korea Utara sebelum Korea Utara melakukan hal yang sama. Hal ini dilakukan Malaysia karena Korea Utara dianggap melindungi tersangka pembunuhan Kim Jong Nam. Malaysia sudah tidak lagi membeli barang dari negara tersebut sejak Juni dan Juli 2017. Berdasarkan data dari Departemen Statistik, transaksi pembelian barang terakhir dari

² Lihat Bab 1

³ Permintaan untuk menemukan dan menahansementara ekstradisi yang tertunda, atau untuk mencari dan menuntun individu untuk menjalanihukuman.

⁴ Lihat Bab I

Korea Utara oleh Pemerintah Negeri Jiran adalah senilai 20,6 juta ringgit atau sekira Rp65,8 miliar. (Sukarno, 2018).

Penyelidikan terhadap kematian Kim Jong Nam yang dikenal sebagai kakak tiri Presiden Korea Utara Kim Jong-un terus bergulir. Pemeriksaan *post-mortem* sudah dijalankan, Kim Jong-nam sejak kecil hidup dalam pengasingan. Ketika adiknya, Kim Jong-un naik takhta, dia pun kabur ke Malaysia dan bersembunyi di sana. Meskipun disebut bersembunyi, pria 46 tahun itu menjalankan gaya hidup mewah dan terbuka. Dia bebas berkeliaran di dalam maupun ke luar negeri. Pada hari kematiannya, Senin 13 Februari 2017, Jong-nam memakai nama samaran Kim Chol di paspor palsunya. Dan hendak terbang ke Makau dari Bandara Internasional Kuala Lumpur. Rekaman CCTV di terminal dua memperlihatkan Jong-nam sedang mengantre di depan mesin pendaftaran (*check-in*). (Dharma, 2017).

Hwang Cheol-Hwan yang merupakan koresponden Partai Buruh Korea Utara, mengatakan bahwa petugas Malaysia telah memeriksa isi rekaman video CCTV tentang pembunuhan Kim Jong Nam, Malaysia mengatakan mereka tidak melakukan kejahatan dengan maksud untuk membunuh. Spekulum ini juga disampaikan, dalam hal ini para terdakwa berhati-hati untuk tidak menyentuh cairan VX⁵ di muka Kim Jung Nam dan langsung pergi untuk mencuci tangan dengan cepat pergi ke kamar mandi, hal ini terekaman CCTV bandara sebagai bukti di pengadilan. (Chul, 2018).

Menteri Kesehatan Datuk Seri Dr S Subramaniam membenarkan tentang laporan kematian mayat Kim Jong Nam tidak menyebutkan dia meninggal karena serangan jantung. Tim forensik Malaysia telah membantah klaim Korea Utara bahwa Kim Chol mungkin telah meninggal akibat serangan jantung. Korea Utara mengatakan Kim meninggal karena serangan jantung, bagaimana bisa pemerintah Korea Utara yang tidak melakukan otopsi atau melihat laporannya dapat membuat kesimpulan tersebut, pernyataan juru bicara kedutaan Korea

⁵ Lihat Bab III

Utara yang mengklaim bahwa Kim meninggal karena serangan jantung dan tidak diracuni menggunakan racun saraf VX.⁶ Dr Subramaniam mengatakan Malaysia telah menyelesaikan otopsi yang adil dan didukung oleh Departemen Kimia. Pemerintah Malaysia akan mengikuti penyelidikan dan telah menyiapkan otopsi secara adil. The Associated Press melaporkan seorang pengacara wanita Vietnam dituduh meracuni pemimpin Korea Utara, mengatakan bahwa adanya keraguan dalam kasus ini, dengan demikian menjadi penyebab dari hasil otopsi kedua. Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar online Vietnam Zing, pengacara Selvam Shanmugam, mengatakan klaim korban masalah kesehatan bisa menjadi alasan bahwa bedah mayat baru bisa dilakukan. (Bernama, 2017). Setelah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Kim Jong Nam, serta pemeriksaan terhadap tersangka pembunuhan yaitu dua warganegara asing asal Indonesia dan Vietnam tersebut, Malaysia juga mencari tersangka lain yang diduga merupakan warganegara Korea Utara., sehingga penyelidikanpun masih terus berlanjut.

⁶ Lihat Bab III